

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



TAHUN 2022



PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa karena di Tahun 2022, kami dapat menghimpun permohonan informasi dan dokumentasi publik yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dalam bentuk buku Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik (LLID) sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pasal 56 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang menyebutkan bahwa “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan laporan layanan informasi dan dokumentasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir”.

Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah secara resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait pandemi Covid-19. Meskipun kebijakan PPKM telah resmi dicabut, masyarakat diminta meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi resiko Covid. Demi mempertahankan pelayanan prima bagi masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya berusaha melaksanakan secara optimal dengan menyediakan informasi, agar masyarakat mendapatkan pelayanan informasi melalui datang langsung dengan tetap menjaga protokol kesehatan, dan pelayanan informasi melalui online menggunakan laman ppid.surabaya.go.id dan e-mail mediacenter@surabaya.go.id.

Kami sampaikan terima kasih apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang aktif bekerja sama dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Surabaya selama ini, terutama kepada para PPID Pembantu.

Kedepannya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Surabaya diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi kepada Publik.



DAFTAR ISI

PENGANTAR

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**

GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
SARANA DAN PRASARANA
SUMBER DAYA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
ANGGARAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI
RINGKASAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

**KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**REKOMENDASI RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI
PUBLIK**

PENUTUP

VISI

Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan meningkatkan pengelolaan komunikasi publik

MISI

Meningkatkan cakupan masyarakat yang terjangkau informasi Publik

Meningkatkan kecepatan respon terhadap pengaduan / permohonan informasi Publik

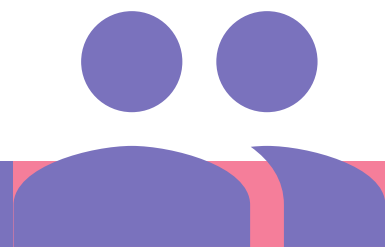
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Surabaya

GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, sebagaimana hak untuk mendapatkan informasi yang tertuang pada Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara terbuka adalah hak Publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.



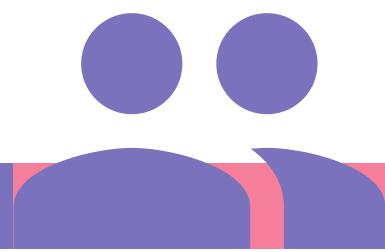
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Surabaya

GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Surabaya adalah Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID Kota Surabaya dibantu oleh PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional, sesuai amanat Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Keberadaan PPID Kota Surabaya membuat masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena pelayanan lewat satu pintu.

Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022, membuat penyelenggaraan layanan Publik Pemerintah Kota Surabaya harus tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya PPID Kota Surabaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

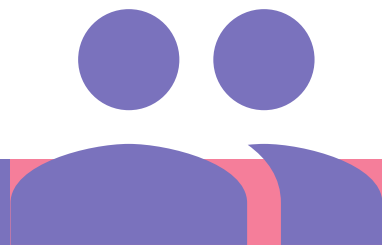


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Surabaya

DASAR HUKUM

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan meningkatkan pelayanan informasi Publik, Pemerintah Kota Surabaya berpedoman pada regulasi sebagai berikut :

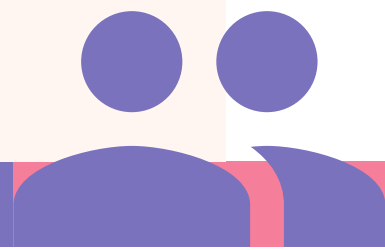
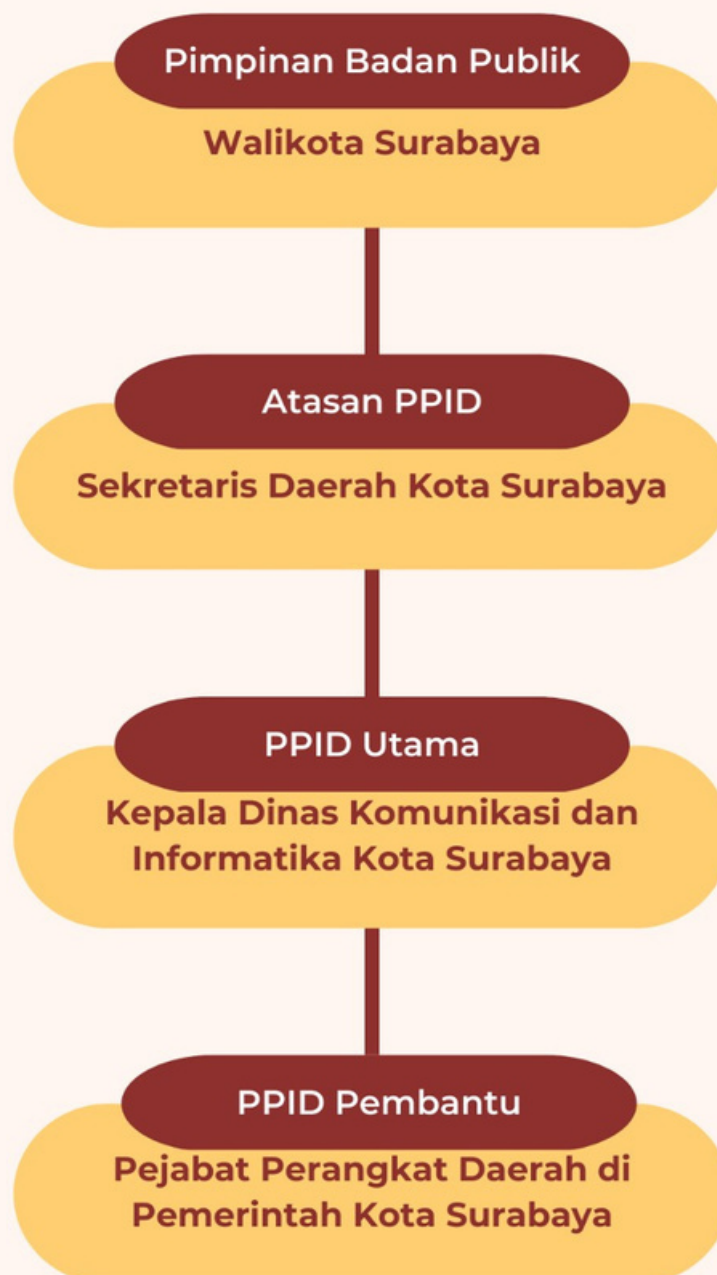
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
- Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/24/436.1.2/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Surabaya



Struktur Organisasi



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

SARANA DAN PRASARANA

Sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, dengan hari pelayanan hari Senin - Jumat dan jam pelayanan pukul 09:00 - 15:00 WIB, melalui :

Website atau Email

Masyarakat dapat mengakses permohonan informasi publik yang tersedia pada website <https://ppid.surabaya.go.id/> maupun melalui email mediacenter@surabaya.go.id

Pengiriman Surat Pos

Mengirimkan surat melalui pos, ditujukan kepada : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Surabaya, beralamat di Gedung Pemerintah Kota Surabaya Jl. Jimerto No. 25-27 Lantai V - Surabaya

Datang Langsung

Datang langsung ke ruangan layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan alamat : Gedung Pemerintah Kota Surabaya, Jl. Jimerto No. 25-27 Lantai V - Surabaya

Layanan Untuk Penyandang Disabilitas

PPID Kota Surabaya telah memfasilitasi penyandang disabilitas melalui layanan di laman ppid.surabaya.go.id melalui menu Accessibility Tools

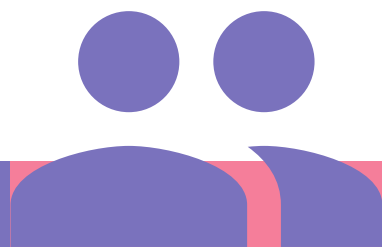
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

SUMBER DAYA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

Pelayanan informasi publik oleh PPID Kota Surabaya melibatkan staf Sub Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.

Untuk melayani masyarakat, Desk Pelayanan Informasi Publik telah menempatkan 1 (satu) orang petugas informasi.

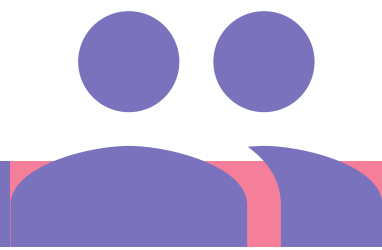
Dalam menjalankan tugasnya PPID Kota Surabaya dibantu oleh para PPID Pembantu yang berada di lingkungan Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/24/436.1.2/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

ANGGARAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI

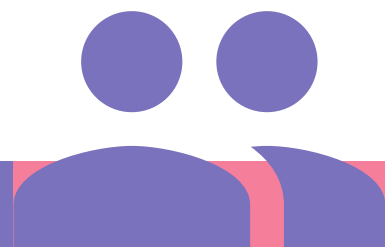
Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Surabaya telah dianggarkan pada APBD Kota Surabaya Tahun 2022 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 859.037.052,00



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

RINGKASAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

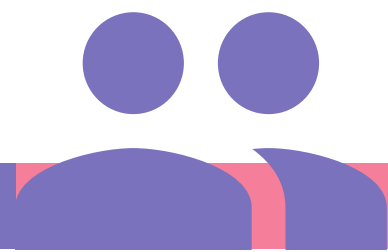
LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK						
PPID KOTA SURABAYA						
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022						
NO.	NAMA	WAKTU YANG DIPERLUKAN (HARI KERJA)	PERMOHONAN INFORMASI			
			DIKABULKAN SELURUHNYA	DIKABULKAN SEBAGIAN	DITOLAK	KETERANGAN
1	Afifah Nadhirah	1	√	-	-	Dapat Dipenuhi
2	Muhammad Hidayat S	14	-	-	√	Informasi Dikecualikan
3	Muhammad Hidayat S	5	√	-	-	Dapat Dipenuhi
4	Muhammad Hidayat S	10	-	√	-	1. Ada poin informasi yang belum dikuasai / didokumentasikan; 2. Ada poin informasi yang merupakan informasi dikecualikan
5	Purwomartono	10	-	-	√	Informasi Dikecualikan
6	Eddy Tarmidi Widjaja selaku Ketua Perkumpulan Paguyuban Warga Citraland "PAWACITRA"	12	-	-	√	Informasi Belum Dikuasai
7	Muhammad Hidayat S	12	-	√	-	Ada poin informasi yang belum dikuasai / didokumentasikan;
8	Muhammad Hidayat S	11	-	√	-	Ada poin informasi yang belum dikuasai / didokumentasikan;
9	Heru Putra Dewantara selaku Kuasa Yusak Ivandy	4	-	-	√	Informasi Dikecualikan
10	Budi Hartono Atatang	8	-	√	-	Ada poin informasi yang belum dikuasai / didokumentasikan;



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

RINGKASAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

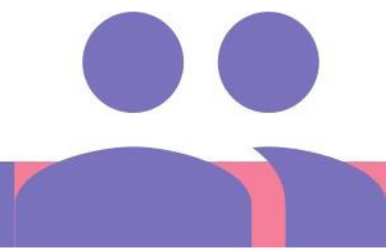
11	Muhammad Hidayat S	12	-	√	-	1. Ada poin informasi yang belum dikuasai / didokumentasikan; 2. Ada poin informasi yang merupakan informasi dikecualikan
12	Eddy Tarmidi Widjaja selaku Ketua Perkumpulan Paguyuban Warga Citraland "PAWACITRA"	10	-	-	√	Informasi Dikecualikan
13	Muhammad Hidayat S	10	-	√	-	Ada informasi yang masih dalam Tahun Anggaran Berjalan
14	Kustina Selaku Kuasa dari Hartono Direktur PT Unichemcandi Indonesia	10	-	√	-	Ada poin informasi yang merupakan informasi dikecualikan
15	Widodo Roespantoro Selaku Kuasa dari Bambang Supartono	16	-	-	√	Informasi Tidak Dikuasai
16	Aan Ainur Rofik	9	-	-	√	Informasi Tidak Dikuasai
17	Muji Nurjaroh, S.H. Selaku Kuasa Rommy Riedel Soputan	15	-	-	√	1. Pemohon telah melampirkan identitas KTP, sebagai bukti kependudukan; 2. Ada poin permohonan yang bukan menjadi kewenangan PPID
18	Apollo Parasian Sihombing selaku Ketua LSM Aliansi Perduli Indonesia Jaya (LSM APIJ)	16	-	√	-	Diberikan rekapitulasinya sesuai dengan tujuan permohonannya
19	Wahyu Eka Setyawan selaku Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jatim	14	-	-	√	Informasi Dikecualikan
20	Samo	17	-	-	√	Informasi Dikecualikan



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

RINGKASAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

21	Aisyah	17	-	√	-	-
22	Aisyah	12	-	-	√	Informasi Dikecualikan
23	Wahyu Eka Setyawan selaku Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jatim	13	-	-	√	Pemohon diminta membuktikan dalilnya
24	Dian Pradana Saleh, S.H., advokat pada Kantor Hukum Pieter Talaway & Associates selaku Kuasa Hukum Ferry Widargo	10	-	-	√	Informasi Tidak Dikuasai
25	Abdul Habir, S.H., selaku Kuasa Hukum Sdr. Ir. Slamet Supriyadi GS Ahli Waris Alm. Mohamad Marjono	10	-	-	√	Informasi Dikecualikan
26	X X X	13	-	-	√	Informasi Dikecualikan
27	Soeharnoto	9	-	-	√	Informasi Tidak Dikuasai
28	M. Tambunan, S.H., dan Rekan selaku Kuasa Hukum Sdr. Andy Sutristiyono	8	-	-	√	Informasi Tidak Dikuasai
29	Kristianto selaku Kuasa Ika Kurnia Retno Ningrum dan Dwi Ayu Puspita Ningtyas	1	√	-	-	Dapat Dipenuhi
JUMLAH PERMOHONAN			3	9	17	29 PERMOHONAN
JUMLAH RATA-RATA (HARI KERJA)			11			



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

RINGKASAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

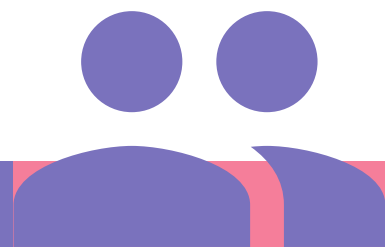
BULAN	JUMLAH PERMOHONAN
JANUARI	1
FEBRUARI	0
MARET	3
APRIL	6
MEI	2
JUNI	3
JULI	0
AGUSTUS	6
SEPTEMBER	4
OKTOBER	1
NOVEMBER	2
DESEMBER	1
TOTAL TAHUN 2022	29



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

RINGKASAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

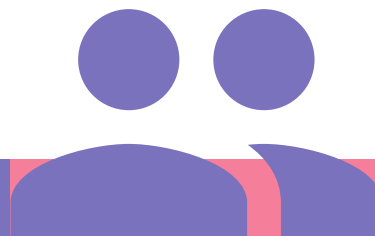
NO.	NOMOR REGISTER	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN	KEPUTUSAN	ALASAN PENOLAKAN	TANGGAL JAWABAN
1.	001/PPID/I/2022	24/01/2022	Atifah Nadhirah	Mahasiswa	Data penguduan masyarakat Kota Surabaya periode Januari 2021 - Desember 2021	Kepentingan penelitian Tugas Akhir dengan judul "Penggunaan Jaringan Kata Kunci dalam Penentuan Dominasi Keluhan Masyarakat Surabaya Berdasarkan Karakteristik Smart City"	Dapat Dikabulkan	-	24/01/2022
2	001/PPID/III/2022	10/03/2022	Muhammad Hidayat S	Wiraswasta	Profil dan Biodata Walikota, Wakil Walikota, dan seluruh pejabat eselon 2, 3 di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama istri/suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana/disiplin pegawai/kode etik yang pernah diterima	Mendorong Keterbukaan Informasi Publik dan Memberikan Saran Masukan	Tidak Dapat Dikabulkan	Informasi Dikecualikan	29/03/2022
3	002/PPID/III/2022	24/03/2022	Muhammad Hidayat S	Wiraswasta	1. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, yang menetapkan tentang klasifikasi informasi publik dan/atau hasil uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, beserta seluruh lampirannya; 2. Penjelasan tertulis, mengenai alasan belum diterbitkannya Surat Keputusan sebagaimana poin 1 tersebut di atas, apabila Pemerintah Kota Surabaya belum menerbitkan Keputusan tersebut; 3. Surat Keputusan tentang Pengangkatan atau Penunjukan PPID di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya saat ini.	Pengawasan masyarakat dan mendorong keterbukaan informasi publik dan memberikan saran masukan	Dapat Dikabulkan	-	30/03/2022
4	003/PPID/III/2022	30/03/2022	Muhammad Hidayat S	Wiraswasta	1. Surat Keputusan tentang pengangkatan atau penunjukan Walikota dan seluruh pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya saat ini; 2. Surat Keputusan tentang Daftar Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2021 dan 2022; 3. Penjelasan tertulis, apakah Pemerintah Kota Surabaya pernah digugat ke Komisi Informasi atau menjadi pihak Termohon dalam perkara sengketa informasi publik di Komisi Informasi? Jika pernah, berapa kali, kapan, dimana, dan bagaimana posisi akhir kasusnya?; 4. Semua salinan Putusan dan/atau salinan Kesepakatan Mediasi dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi sebagaimana poin 3 diatas; 5. Rekapitulasi penolakan permohonan informasi oleh PPID Pemerintah Kota Surabaya sejak dibentuknya, yang memuat keterangan, nama dan alamat Pemohon Informasi, tanggal permohonan, materi informasi yang dimohon, tanggal tanggapan PPID, alasan penolakan, tanggal pengajuan keberatan oleh Pemohon, tanggal tanggapan keberatan oleh Atasan PPID, dan isi tanggapan keberatan oleh Atasan PPID; 6. Penjelasan tertulis, apakah Pemerintah Kota Surabaya memiliki atau menguasai informasi "Bukti alas hak mutasi Nomor Objek Pajak (NOP) atas nama Hartati ke PT. Kencana Cipta Abadi"; 7. Salinan dokumen sebagaimana poin 6 tersebut diatas.	Pengawasan masyarakat dan mendorong keterbukaan informasi publik dan memberikan saran masukan	Dikabulkan Sebagian	1. Ada poin informasi yang belum dikuasai/didokumentasikan; 2. Ada poin informasi yang merupakan informasi dikecualikan	12/04/2022
5	001/PPID/IV/2022	06/04/2022	Purwomartono	Belum/Tidak Bekerja	1. Objek IPT No. 188.45/164SP/402.05.12/2001 atas nama Dwidjo Sepuro Maryono terletak di Npapel Wasana 1 No. 40 adalah tanah milik Pemkot Surabaya atukah tanah tersebut milik Bapak Dwidjo Sepuro Maryono; 2. Apakah dasar hukum tanah IPT tersebut diatas adalah milik Pemkot	1. Untuk mendapatkan dari Pemkot tentang status tanah yang saya tanyakan 2. Kalau memang benar-benar tanah dimaksud bukan merupakan aset Pemkot saya minta keterangan tertulis dari Pemkot untuk rekomendasi pengurusan SHM ke BPN	Tidak Dapat Dikabulkan	Informasi Dikecualikan	20/04/2022



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

RINGKASAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

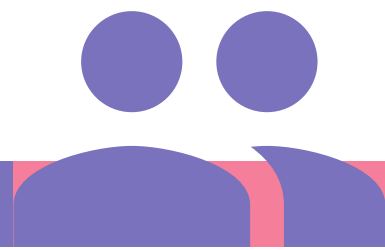
6	002/PPID/IV/2022	11/04/2022	Eddy Tarmidi Widjaja selaku Ketua Perkumpulan Paguyuban Warga Citraland "PAWACITRA"	Karyawan Swasta	Data Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang ada di kawasan perumahan Citraland Surabaya baik yang telah diserahkan maupun yang belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Surabaya	Memaksimalkan Fungsi Pemakaian dan Pengawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang ada di kawasan perumahan Citraland Surabaya	Tidak Dapat Dikabulkan	Informasi Belum Dikuasai	27/04/2022
7	003/PPID/IV/2022	13/04/2022	Muhammad Hidayat S	Wiraswasta	1. Surat Keputusan/Peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tentang Pejabat Wajib Laporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan pejabat wajib laporan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. 2. Surat Keputusan/Peraturan tentang unit/satuan kerja pengelola LHKPN/LHKASN di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. 3. Dokumen lengkap LHKPN dan LHKASN dari seluruh pejabat wajib laporan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, yang bertanda tangan masing-masing pejabat wajib laporan, untuk tahun pelaporan tahun 2021 dan 2022. 4. Rekapitulasi pelaporan LHKPN dan LHKASN dari seluruh pejabat wajib laporan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya untuk pelaporan tahun 2021 dan 2022, yang memuat keterangan nama pejabat wajib laporan, jabatan saat ini, tanggal pelaporan, tanggal tanda terima pelaporan yang diterbitkan oleh KPK RI dan/atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. 5. Penjelasan tertulis, apa sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pejabat wajib laporan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang melalaikan kewajiban menyampaikan laporan LHKPN/LHKASN dan/atau tidak menyampaikan laporan secara tepat waktu?	Mendorong keterbukaan informasi publik dan memberikan saran masukan kepada badan publik	Dikabulkan Sebagian	Ada poin informasi yang belum dikuasai/didokumentasikan;	09/05/2022
8	004/PPID/IV/2022	14/04/2022	Muhammad Hidayat S	Wiraswasta	1. Rekapitulasi rencana pengalokasian anggaran pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 untuk program/kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang terkait dengan terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia dan upaya penanggulangannya, yang memuat keterangan nama program/kegiatan, jumlah/pagu anggaran, satuan kerja yang mengusulkan/mengelola, dan tanggal diujulkannya usulan kegiatan/anggaran. 2. Rekapitulasi realisasi kegiatan/anggaran untuk program/kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang terkait dengan terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia dan upaya penanggulangannya pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022, yang memuat keterangan nama program/kegiatan, jumlah anggaran, bentuk kegiatan, satuan kerja yang mengelola, dan tanggal dimulai/dilaksanakannya kegiatan, dan tanggal pencairan anggaran.	Mendorong keterbukaan informasi publik dan memberikan saran masukan kepada badan publik	Dikabulkan Sebagian	Ada poin informasi yang belum dikuasai/didokumentasikan;	09/05/2022
9	005/PPID/IV/2022	20/04/2022	Heru Putra Dewantara selaku Kuasa Yusak Ivandy	Advokat	1. Siapa nama pemilik terakhir dari petok nomor 3290 dengan nomor persil 134 yang tercatat dalam buku tanah Kelurahan Medokan Ayu ? 2. Apakah didalam riwayat tanah petok nomor 3290 dengan nomor persil 134 pernah tercatat nama Sdr. Gufron sebagai pemilik dalam buku tanah Kelurahan Medokan Ayu ?	Mencari kepastian pemilik sah atas tanah Letter C No. 3290/Medokan Ayu	Tidak Dapat Dikabulkan	Informasi Dikecualikan	25/04/2022



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

RINGKASAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

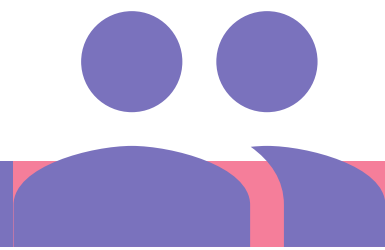
10	006/PPID/IV/2022	22/04/2022	Budi Hartono Atatang	Wiraswasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alamat email kantor makam Kristen kembang kuning kota Surabaya 2. Tanah Makam untuk jenazah kakek-nenek saya di Makam Kristen Kembang Kuning kota Surabaya apakah dikenakan iuran/pungutan/retribusi bulanan? 3. Kakek dan nenek saya dimakamkan di lokasi tanah makam Kristen kembang kuning, apabila dikenakan iuran/pungutan/retribusi, saya sebagai cucu dalam(garis ibu) yang akan membayar untuk iuran/pungutan/retribusi satu bulan ini saja di bulan Ramadan? 4. Berapa nomor id pelanggan PLN di alamat jl. Nelayan no. 66 kelurahan Krembangan Selatan kota Surabaya 5. alamat permanen sesuai NIK 5103062103770002 ditanyakan ke Disdukcapil kota Surabaya karena data kependudukan tercatat sebagai penduduk Surabaya juga 6. Besaran Biaya pengandaan informasi dan dokumentasi yang ditanggung pemohon informasi 	<p>1. Ahli waris atas tanah dan bangunan kakek , nenek dan Almarhumah ibu kandung/sedarah saya yang semasih hidup/ muda PERNAH tinggal di jalan Nelayan No. 66 Kelurahan Krembangan Selatan Kota Surabaya(depan rumah ada pohon srikaya)</p> <p>2. Pasal 1967 KUHP</p> <p>3. Perolehan informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana</p> <p>4. PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 07 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN, PENGABUAN JENAZAH DAN PERIZINAN DI BIDANG PEMAKAMAN</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan;</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Retribusi penggunaan tanah makam pada lokasi makam lama untuk setiap jenazah ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>5. Peraturan menteri dalam negeri RI nomor 3 tahun 2017 Pasal 26</p> <p>6. Beasiswa Penuh Pendidikan Menengah Pertama, Atas dan Tinggi untuk ahli waris saya</p>	Dikabulkan Sebagian	Ada poin informasi yang belum dikuasai/didokumentasikan;	11/05/2022
11	001/PPID/V/2022	12/05/2022	Muhammad Hidayat S	Wiraswasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan tertulis, berapa standar gaji dan tunjangan serta honor yang diterima oleh/diberikan kepada masing-masing Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya saat ini? 2. Penjelasan tertulis, fasilitas apa saja yang diterima oleh/diberikan kepada masing-masing Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya saat ini? 3. Penjelasan tertulis, penerimaan penghasilan apa yang diperoleh Walikota dan Wakil Walikota Surabaya yang bersumber dari APBD Kota Surabaya dan/atau APBN selain dari penerimaan gaji dan tunjangan? 4. Bukti penerimaan/pencairan dana dari seluruh transaksi pembayaran gaji, tunjangan dan honor untuk bulan Januari, Februari, Maret dan April 2022 yang diterima oleh masing-masing Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya saat ini. 5. Bukti serah terima pemakaian fasilitas dinas oleh masing-masing Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya saat ini. 6. Seluruh Peraturan/Keputusan yang menjadi dasar hukum pembayaran gaji, tunjangan, honor, dan penerimaan fasilitas dinas dari seluruh pejabat/aparaturnegara di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. 	<p>Mendorong keterbukaan informasi publik dan memberikan saran masukan dalam rangka pengawasan masyarakat dan peran serta untuk mewujudkan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.</p>	Dikabulkan Sebagian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada poin informasi yang belum dikuasai/didokumentasikan; 2. Ada poin informasi yang merupakan informasi dikecualikan 	31/05/2022
12	002/PPID/V/2022	19/05/2022	Eddy Tarmidi Widjaja selaku Ketua Perkumpulan Paguyuban Warga Citraland "PAWACITRA"	Karyawan Swasta	Data Site Plan awal ketika ijin lokasi diterbitkan dikawasan perumahan Citraland Surabaya	Mengetahui letak fasilitas umum dan fasilitas sosial yang di sediakan pengembang kepada masyarakat penghuni kawasan perumahan Citraland	Ditolak	Informasi Dikecualikan	02/06/2022



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

RINGKASAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

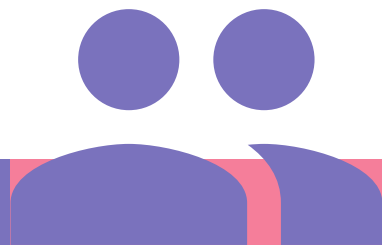
13	001/PPID/VI/2022	03/06/2022	Muhammad Hidayat S	Wiraswasta	<p>1. Penjelasan tertulis, apakah PPIID badan publik (sesuai daftar di atas) menyediakan sarana pelayanan informasi publik berupa desk pelayanan informasi publik untuk melayani pemohon/pengguna informasi publik yang datang langsung ke kantor PPIID badan publik? Menyediakan alamat korespondensi kantor dan alamat surat menyurat secara elektronik (email) untuk melayani pemohon/pengguna informasi publik yang mengakses layanan dengan cara berkirim surat? Menyediakan formulir isian elektronik pada situs resmi badan publik dan/atau aplikasi mobile untuk melayani pemohon yang mengakses pelayanan melalui layanan online/mobile? Menyediakan sarana pelayanan informasi publik yang bersifat khusus untuk melayani pemohon/pengguna informasi publik dari kalangan disabilitas?</p> <p>2. Penjelasan tertulis, apakah informasi sebagaimana poin 1 di atas diumumkan kepada publik melalui situs resmi masing-masing badan publik dan akun media sosial badan publik (sesuai daftar di atas)? Apa link/situs dari konten informasi tersebut pada situs resmi badan publik dan akun media sosial badan publik?</p> <p>3. Penjelasan tertulis, apakah PPIID badan publik (sesuai daftar di atas) pernah memberikan pelayanan informasi publik kepada Pemohon/Pengguna informasi publik dari kalangan disabilitas? Berapa kali dan kapan pelayanan tersebut diberikan serta bagaimana prosedurnya?</p> <p>4. Berapa nilai pagu anggaran dan nilai realisasi anggaran pelayanan informasi publik dari masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2020, 2021, dan 2022?</p>	<p>1. Untuk mengetahui kinerja badan publik dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik.</p> <p>2. Untuk menilai tingkat kepatuhan badan publik terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Untuk bahan penyusunan peringkat badan publik terbaik/terburuk dalam implementasi UU KIP versi MITRA KIP.</p>	Dikabulkan Sebagian	Ada informasi yang masih dalam Tahun Anggaran Belanja	16/06/2022
14	002/PPID/VI/2022	14/06/2022	Kustina Selaku Kuasa dari Hartono Direktur PT Unichemcandi Indonesia	Sales Manager	<p>Data informasi :</p> <p>1. Nama Usaha / Perusahaan;</p> <p>2. Alamat;</p> <p>3. Nama Produk / Merk / Jenis Produk Makanan;</p> <p>4. Nomor Kontak Personal;</p> <p>5. Nomor Telepon</p>	<p>1. Penetapan jadwal kunjungan kurjungan untuk menawarkan produk meica bubuk dan ketumbar bubuk pelaku UMKM dan Perindustrian di bidang makanan ;</p> <p>2. Pemetaan area team sales yang akan menawarkan produk meica bubuk dan ketumbar bubuk supaya tepat sasaran ;</p> <p>3. Database perusahaan yang tujuannya benar-benar murni sebagai data dan tidak diperjualbelikan</p>	Dikabulkan Sebagian	Adapun informasi yang merupakan informasi dieksculikan	27/06/2022
15	003/PPID/VI/2022	20/06/2022	Widodo Roespantoro Selaku Kuasa dari Bambang Supatono	Karyawan Swasta	Copy Site Plan Perumahan Gunung Anyar Emas No. Gambar 619/SP/2001 No Blad Peta 32-49.50 PT, Surya Citra Indonesia	Gugatan PTUN	Ditolak	Informasi Tidak Dikuasai	11/07/2022
16	001/PPID/VIII/2022	08/08/2022	Aan Amur Rofik	Advokat	Salinan Dokumen Sertifikat Laik Fungsi Gedung The Trans Icon Surabaya	Memastikan bahwa pembangunan gedung The Trans Icon sudah sesuai dengan peraturan, perundang-undangan yang berlaku mengenai kelayakan dan fungsi dari gedung The Trans Icon yang berada di Jalan Ahmad Yani Kota Surabaya	Ditolak	Informasi Tidak Dikuasai	19/08/2022
17	002/PPID/VIII/2022	19/08/2022	Muji Nurjaroh, S.H. Selaku Kuasa Rommy Riedel Soputan	Karyawan Swasta	<p>1. Apakah benar Sdr. ROMMY RIEDEL SOPUTAN terdaftar/tercatat STATUS KEPENDUDUKANNYA sebagai warga negara kota surabaya di dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;</p> <p>2. Bilamana antara ROMMY RIEDEL SOPUTAN dengan isterinya yang bernama ATIEK HARIYATI tercatat di dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, mohon agar dibuatkan Surat Keterangan Pencatatan Kependudukan antara ROMMY RIEDEL SOPUTAN dengan ATIEK HARIYATI</p>	Sebagai bukti untuk kepengurusan Penjualan 1 Unit Rumah terletak di Perum Palm Spring Blok C No. 145 Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 641 atas nama ROMMY RIEDEL SOPUTAN .	Ditolak	<p>1. Pemohon telah melampirkan identitas KTP, sebagai bukti kependudukan;</p> <p>2. Ada poin permohonan yang bukan menjadi kewenangan PPIID</p>	08/09/2022



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

RINGKASAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

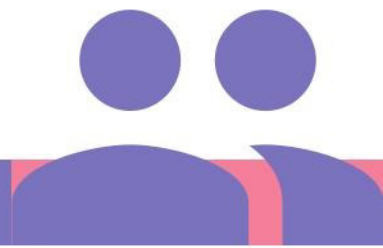
18	003/PPID/VIII/2022	22/08/2022	Apollo Parasian Sihombing selaku Ketua LSM Aliansi Perduli Indonesia Jaya (LSM APIJ)	Wiraswasta	Informasi dan Dokumen terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sumber pendansannya dari Dana Bagi Hasil Cukai, Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran (TA) 2020 - 2022 Pemerintah Kota Surabaya yang sekurang-kurangnya memuat : 1. Besaran DBH CHIT yang dikelola masing-masing Organisasi Perangkat Daerah 2. Nilai anggaran masing-masing kegiatan dan nama kegiatan serta lokasinya 3. Dokumen pemilihan tender 4. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAILP) 5. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPB-J) 6. Kontrak kerja 7. Jaminan pelaksanaan 8. Jaminan uang muka 9. Surat penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 10. Bukti potong pajak 11. Rencana kerja dan syarat-syarat 12. Kerangka acuan kerja 13. Metode pelaksanaan pekerjaan 14. Item dan volume pekerjaan (BOQ + RAB) 15. Shop drawing dan As built drawing (konstruksi) 16. Harga satuan pekerjaan 17. Tanggal PHO + FHO 18. Berita acara pemeriksaan 19. Berita acara penilaian hasil pekerjaan	Ikut serta mengawasi penggunaan dana yang bersumber dari keuangan negara pada kegiatan yang pendansannya bersumber dari DBH CHIT Tahun Anggaran 2020-2022	Ditolak	Diberikan rekapitulasinya sesuai dengan tujuan pemohonannya	12/09/2022
19	004/PPID/VIII/2022	29/08/2022	Wahyu Eka Setyawan selaku Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jatim	Pelajar/Mahasiswa	Dokumen AMDAL Proyek PLTsa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) Waste to Energy Project yang terletak di Benowo	1. Sebagai bahan di internal Walhi Jawa Timur mengenai Waste to Energy; 2. Sebagai wujud bentuk partisipasi publik untuk melindungi dan mempertahankan kelestarian lingkungan; 3. Sebagai arsip perpustakaan Walhi Jawa Timur	Ditolak	Informasi Dikecualikan	15/09/2022
20	005/PPID/VIII/2022	29/08/2022	Sarno	Karyawan Swasta	1. Sertifikat HPL No. 1 / Kelurahan Jagir, tgl 23 Oktober 2021; 2. Sertifikat HPL No. 2 / Kelurahan Jagir, tgl 23 Oktober 2021; 3. Sertifikat HPL No. 3 / Kelurahan Jagir, tgl 23 Oktober 2021; 4. Akta Perdjandjian Sewa-Menyewa Djangka Panjang No. 186, tgl 19 Mei 1962.	Ingin mengetahui dasar perolehan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya pada waktu itu dalam memohon Hak Pengelolaan serta Isi dari Akte Perdjandjian Sewa Menyewa Djangka Panjang	Ditolak	Informasi Dikecualikan	20/09/2022
21	006/PPID/VIII/2022	29/08/2022	Aisyah	Belum/Tidak Bekerja	Salinan Surat Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 29 Agustus 1994 Nomor : 593.01/2872/402.1.02/94 dan Dasar Hukum Rekomendasi Surat Persetujuan Pemberian HGB diatas HPL kepada Pihak ketiga	Klarifikasi	Dikabulkan Sebagian		20/09/2022
22	001/PPID/IX/2022	05/09/2022	Aisyah	Belum/Tidak Bekerja	Salinan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Surabaya yang digunakan Sebagai Dasar Permohonan SK HPL No. 54/HPL/JPBN/97 Tanggal 8 April 1997	Klarifikasi	Ditolak	Informasi Dikecualikan	20/09/2022
23	002/PPID/IX/2022	14/09/2022	Wahyu Eka Setyawan selaku Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jatim	Pelajar/Mahasiswa	Izin lingkungan pembangunan di Waduk Sepat	Berkaitan dengan persoalan alih fungsi Waduk Sepat yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri	Ditolak	Pemohon diminta membuktikan dalilnya	30/09/2022



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

RINGKASAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

24	003/PPID/IX/2022	19/09/2022	Dian Pradana Saleh, S.H., advokat pada Kantor Hukum Pieter Talaway & Associates selaku Kuasa Hukum Ferry Widargo	Advokat	Data (Legalitas) Koperasi Pondok Pesantren Assyadzilyah Surabaya, apakah terdaftar pada data Pemerintah Kota Surabaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Bahwa Pemohon adalah Pihak yang berkepentingan yaitu sebagai korban dalam perkara pidana yang saat ini tengah berjalan persidangan dalam perkara No. 1109/Pid.B/2022/PN.Sby yang melibatkan H. Zainal Adyem, S.H., / H. Zainal Adyem, S.H., bin Achmad Moehyidin mengaku sebagai Ketua Koperasi Assyadzilyah Surabaya	Ditolak	Informasi Tidak Dikuasai	30/09/2022
25	004/PPID/IX/2022	26/09/2022	Abdul Habib, S.H., selaku Kuasa Hukum Sdr. Ir. Slamet Supriyadi OS. Ahli Waris Alm. Mohamad Marjono	Advokat	Pecahan Letter C No. 2159/Persil 13 Kelurahan Tanah Kail Kidinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, atas nama H. Abdullah, tercantor atas nama siapa saja	Peningkatan Bukti Hak	Ditolak	Informasi Dikecualikan	07/10/2022
26	001/PPID/X/2022	18/10/2022	X X X	Karyawan Swasta	Hasil pemeriksaan terkait laporan pelecehan seksual oleh ASN Pemkot Surabaya, X X X	Untuk mengetahui hasil pemeriksaan Inspektorat terkait laporan saya ke wab Pemkot Surabaya	Ditolak	Informasi Dikecualikan	09/11/2022
27	001/PPID/X/2022	16/11/2022	Soeharnoto	Belum/Tidak Bekerja	1. Nama dan NIP Kepala Kantor Inspeksi Ipeda Surabaya (Surabaya Timur/Selatan) 2. Nama dan NIP Camat wilayah Kecamatan Sukolilo pada 31 Desember 1982 3. Nama dan NIP Kepala Desa Kedung Cowek pada 31 Desember 1982	Klarifikasi data yang ada	Ditolak	Informasi Tidak Dikuasai	28/11/2022
28	002/PPID/X/2022	28/11/2022	M. Tambunan, S.H., dan Rekan selaku Kuasa Hukum Sdr. Andy Sutrisniyono	Advokat	1. Apakah Koperasi Karyawan Sejahtera Unggul Mandiri dan Optimis, Badan Hukum No. 418/84/XXV.37/2011 dan pembentukan tanggal 1 Februari 2019 No. 1, terdaftar dan/atau aktif melaksanakan melaporkan aktivitasnya sebagaimana ketentuan perkeroperasian di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya? 2. Permintaan salinan akta notaris Koperasi Karyawan Sejahtera Unggul Mandiri dan Optimis	Bahan gugatan di Pengadilan	Ditolak	Informasi Tidak Dikuasai	07/12/2022
29	001/PPID/XII/2022	20/12/2022	Kristianto selaku Kuasa & Kur nio Retno Ningrum dan Dwi Ayu Puspita Ningtyas	Karyawan Swasta	Apakah pernah diterbitkan SKRK No. 653/1030/436.6.2/2016 terkait tanah dan rumah yang beralamat di Sempampir Selatan 1-8/9 Surabaya atas nama Alm. Djoko Prayitno	Kepentingan untuk administrasi (menggugat penghuni Sdr. Gayatun)	Dikembalikan seluruhnya	-	20/12/2022



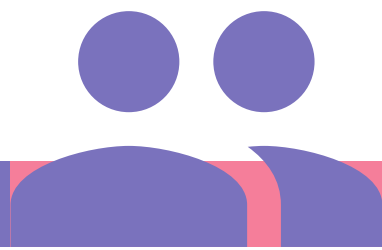
KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala Eksternal :

Masyarakat telah mengetahui dan mengakses layanan PPID, namun belum memahami terkait pelayanan PPID tersebut.

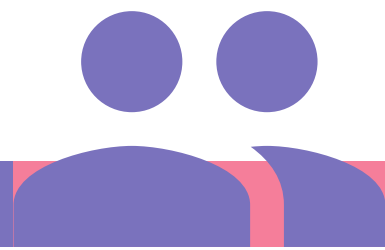
Kendala Internal :

Kurangnya tenaga petugas pelayanan informasi Publik.



REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Edukasi kepada masyarakat terkait layanan PPID
- Peningkatan kompetensi petugas layanan PPID
- Peningkatan koordinasi dengan PPID Pembantu
- Pencarian tenaga petugas layanan PPID
- Peningkatan kompetensi petugas layanan PPID





**Demikian laporan layanan
informasi tahun 2022
disusun sebagai bahan
MONITORING dan evaluasi
terhadap LAYANAN PPID
Kota Surabaya**

